

PAPER
DESA PESISIR DAN PEMBANGUNANNYA DI INDONESIA



Oleh
MALIKA RAFA KHAIRIA
NRP.59235215062

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGELOLAAN
SUMBERDAYA PERAIRAN
2024/2025

DESA PESISIR DAN PEMBANGUNANNYA DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini didasari dari fenomena masih rendahnya pembangunan yang terjadi di daerah-daerah desa pesisir utamanya pembangunan dibidang perekonomian. Untuk itu penelitian ini dilakukan guna mengetahui rendahnya perekonomian masyarakat desa pesisir padahal sumber daya alam (SDA) pesisir sangat melimpah. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan publik yang berhubungan dengan pemberdayaan perekonomian serta pengelolaan wilayah pesisir. Namun demikian yang terjadi perekonomian masyarakat desa pesisir masih sangat rendah. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi didapatkan temuan-temuan tentang rendahnya perekonomian masyarakat desa pesisir ini. Penyebab rendahnya perekonomian ini diantaranya masyarakat kurang dapat menangkap peluang bisnis yang ada. Selain itu pola hidup masyarakat yang kurang tepat secara turun temurun juga menjadi pemicu rendahnya perekonomian mereka. Kurang adanya pemberdayaan yang jelas dari pemerintah guna meningkatkan perekonomian mereka. Belum diberdayakannya secara maksimal SDA wilayah pesisir ini oleh masyarakat desa pesisir serta kurangnya sarana-prasarana infrastruktur desa. Diharapkan adanya peran serta pemerintah secara kongret dalam penanganan serta pemberdayaan perekonomian mereka. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah pembenahan kebijakan publik yang berhubungan dengan pembangunan desa pesisir. Selain itu penyelesaian program pavingisasi dan penerangan jalan juga menjadi program prioritas. Pembinaan dan pemberdayaan perekonomian mereka harus segera dilakukan. Hal lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah optimalisasi wisata religi dan wisata pantai yang ada.

Abstract

This research is based on the phenomenon of the still low development that occurs in coastal areas, especially the development in the economy. For this reason, this research was conducted to determine the low economy of coastal village communities even though coastal natural resources are very abundant. The government has issued public policies related to economic empowerment and management of coastal areas. However, the economy of coastal villages is still very low. By using qualitative methods and phenomenological approaches, findings are found about the low economy of these coastal villages. The reason for this low economy is that the public is unable to capture the existing business opportunities. In addition, the lifestyle of the people who are not right for generations has also been a trigger for their low economy. Lack of clear empowerment from the government to improve their economy. The natural resources of the coastal area have not been maximally empowered by coastal communities and the lack of village infrastructure. It is hoped that the participation of the government in the handling and empowerment of their economy is expected. One solution that can be taken is reforming public policies related to the development of coastal villages. In addition, the completion of the paving and street lighting program is also a priority program. Coaching and empowering their economy must be done immediately. Another thing that can be done by the government is the optimization of existing religious tourism and coastal tourism.

Pendahuluan

Desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan realitas yang keberadaannya mencerminkan masih adanya ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan bila dibandingkan dengan daerah didaratan pada umumnya. Oleh karena itu, kebijakan sosial ekonomi yang berhubungan dengan masyarakat pesisir perlu ditata kembali dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelestarian sumberdaya sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat pesisir dapat dipercepat dan dilakukan secara berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan membutuhkan upaya secara komprehensif, terintegrasi dan terarah kebijakan, mengingat wilayah tersebut memiliki masalah, potensi, dan karakteristik yang unik. Yang paling penting adalah menjadikan kelautan dan perikanan menjadi fokus utama sektor pembangunan, yang merupakan kebutuhan untuk mengubah paradigma pembangunan

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, ada banyak hal yang harus dilakukan guna pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu, dalam amanah pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, semestinya pembangunan desa termasuk didalamnya pembangunan desa pesisir tidak hanya pada pembangunan fisik saja, akan tetapi pembangunan ini harus secara menyeluruh baik secara fisik maupun non fisik.

Pembangunan perekonomian tidak terlepas dari pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perkembangan pendidikan ini cukup tinggi. Partisipasi sosial cukup tinggi, tetapi tingkat partisipasi dalam meningkatkan ekonomi keluarga sangat rendah.

Melihat fenomena yang ada bahwa sebagian besar masyarakat desa pesisir bekerja sebagai nelayan, petambak serta buruh kasar lainnya serta masih hidup dalam kemiskinan. Dari kondisi seperti ini peneliti berpendapat, guna melepaskan mereka dari kondisi kemiskinan serta meningkatkan perekonomian mereka harus adanya pemberdayaan perekonomian secara berkesinambungan.

Namun demikian, pemberdayaan masyarakat desa pesisir tidak terlepas dari kearifan lokal mereka secara generik. Oleh karena itu, dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa pesisir maka pranata sosial budaya masyarakat haruslah menjadi pijakan utama. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini tidak akan bisa diterima oleh masyarakat desa pesisir dengan baik bilamana tidak pernah memperhatikan aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat.

Selain itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Masdjoeki, menjelaskan bahwa partisipasi merupakan pendekatan yang melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam demikian bahwa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja di Indonesia Selain pengelolaan sumber daya laut berdasarkan penggunaan sumber daya yang optimal dan berkelanjutan.

Kesejahteraan merupakan amanat undang-undang dasar 1945. Kesejahteraan pada hakekatnya merupakan tanggungjawab pemerintah. Tetapi sampai saat ini pemerintah belum mampu secara merata untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan dalam kondisi perekonomian bangsa pasca reformasi 1998 sampai saat ini.

Tetapi sebenarnya pemerintah sampai berupaya dengan berbagai bentuk untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini demi meningkatkan kesejahteraan bangsa walaupun hasilnya masih belum sempurna. Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Sementara itu, perekonomian dibangun berdasar atas demokrasi ekonomi demi kemakmuran bagi semua orang.

Dalam mendukung perbaikan ekonomi membutuhkan lembaga independen seperti koperasi. Tugas utama koperasi menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Dari lembaga ini, para nelayan memutuskan untuk bergabung dengan koperasi tersebut.

Sebagai salah satu program perbaikan ekonomi ini dalam melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan Miraza, menjelaskan bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir membuka peluang bagi masyarakat pesisir untuk mendapatkan fasilitas dan akses permodalan.

Sementara itu, untuk pengembangan perekonomian mereka juga dapat melalui pertanian. Pengembangan pertanian pedesaan, diperlukan pendekatan untuk membantu penyuluhan pertanian yang lebih baik dan lembaga layanan pembangunan pedesaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat setempat

Adanya prioritas dalam pengembangan perekonomian ini. Apriliani menjelaskan bahwa prioritas dari semua program alternatif dalam mewujudkan Blue Economy adalah program pemberdayaan masyarakat di Indonesia memantau dan mengendalikan sumber daya laut. Saran yang bisa disampaikan kepada upaya untuk bertransaksi dengan Blue Economy adalah panduan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.

Sebagai salah satu Kabupaten penopang Kota Surabaya serta memiliki kawasan industri dan pergudangan yang cukup banyak dan besar, Kabupaten Sidoarjo telah lama mengikrarkan diri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan diseluruh wilayah. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama dan mendesak yang harus segera dipecahkan

Sementara itu guna mempercepat pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat utamanya masyarakat desa pesisir maka pada tahun 2013 pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57/2013 Tentang Rencana Rinci Masterplan Kawasan Strategis Pesisir Kabupaten Sidoarjo Indonesia. Walaupun peraturan Bupati tersebut telah dijelaskan secara gamblang dan terperinci dimana wilayah pesisir dengan sumber daya alamnya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi dan ekosistem, karena kawasan pesisir merupakan kawasan sumber hayati dan non hayati yang sangat produktif. Namun demikian pengimplementasian kebijakan tersebut belum dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat desa pesisir.

Kesimpulan

bahwa rendahnya tingkat perekonomian masyarakat desa pesisir ini dikarenakan masyarakat belum memanfaatkan SDA pesisir dengan sebaik-baiknya. Selain itu masyarakat juga belum mampu menangkap peluang bisnis dari hasil pemanfaatan sumberdaya pesisir karena rendahnya tingkat pendidikan serta kurang adanya pembinaan dari pemerintah. Sementara sarana prasarana pendukung dan infrastruktur desa pesisir ini juga masih jauh dari yang diharapkan, sehingga menghambat proses pembangunan dari segala aspek.

Guna menyelesaikan berbagai permasalahan ini dibutuhkan kepedulian secara bersama-sama baik dari pemerintah maupun sektor swasta dalam memberikan pembinaan kewirausahaan kepada masyarakat desa pesisir agar segera menangkap peluang bisnis. Program pembenahan infrastruktur jalan dan penerangan menjadi prioritas utama pemerintah. Pemerintah Desa segera mendirikan BUMDes serta mencari terobosan-terobosan baru dalam sistem penjualan hasil olahan masyarakat dan peternakan. Hal ini diperuntukkan agar segala usaha olahan hasil laut yang dilakukan oleh masyarakat mudah untuk dipasarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agossou (2000) Village Participation in Rural Development. Royal Tropical Institute / World Bank. ISBN 90 6832 136 6.
- Apriliani (2014) Economics development analysis. Journal Universitas Negeri Semarang. ISSN 2252-6765.
- Bappenas. 2014, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Denzin and Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research. Edisi Bahasa Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Indarti & Wardana (2013) Metode pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan di wilayah pesisir Kota Semarang. *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 17 (1):75-88.
- Kusnadi. 2002, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan* (Yogyakarta: LKiS, 2002).
- Lasabuda (2013) Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1-2. ISSN: 2302-3589.
- Mardjoeki (2012) Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai utara daerah Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ekonomi*, 1 (1). ISSN: 2302-7169
- Miraza R (2009) Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Universitas Sumatera Utara.
- Merriam SB (2002) Introduction to Qualitative Research. JOSEY-BASS, A Wiley Company – San Fransisco.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Rencana Rinci Masterplan Kawasan Strategis Pesisir Kabupaten Sidorjo.
- Rukin (2015) Pariwisata pesisir sebagai salah satu alternatif pemberdayaan perekonomian masyarakat desa pesisir. *Jurnal Ilmiah Sosial & Humaniora*, 9 (1):36-46. Universitas Surabaya, 2015.
- Rukin, B. Rahman, A. Toha, and N.D. Gianawati. 2018. Coastal rural community economic development as a poverty reduction efforts. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, Volume 5 Issues 4 page 4627-4633. DOI: 10.18535/ijsshi/v5i4.12, ISSN: 2349-2031, 2018, THEIJSSHI.
- Rukin. 2018. Economic development as a way to fight against poverty in a coastal society, *Journal Masyarakat, Kebudayaan & Politik*, Volume 31 Issues 2 page 230-240. Universitas Airlangga, 2018.

Saraswati (2014) Peranan istri nelayan dalam menunjang kehidupan keluarga. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Sara (2014) Pengelolaan Wilayah Pesisir. Gagasan Memelihara Aset Wilayah Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa. Alfabeta Bandung.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.